



Mengering, Waduk Cipancuh Jadi Daratan

Mengering, Waduk Cipancuh Jadi Daratan Waduk Cipancuh di Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, mengering hingga dasar waduk terlihat dan tanah di sejumlah bagian merekah. Waduk seluas kurang lebih 700 hektare yang menjadi salah satu sumber irigasi utama tersebut mengalami penyusutan volume air selama dua bulan terakhir akibat musim kemarau. Kondisi ini berdampak pada kebutuhan pengairan persawahan di lima kecamatan di sekitar waduk (ist.antara)

KORUPSI KUOTA HAJI 2023-2024

20.000 kuota tambahan

- Pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota haji Indonesia untuk 2024.
- Menurut KPK, seharusnya dibagi 92% haji reguler dan 8% haji khusus.
- Dalam perkara ini, kuota tambahan disebut dibagi 50% : 50% atau masing-masing 10.000 kuota.

Rp 622,09 miliar

- Nilai kerugian keuangan negara yang disebut KPK dan kemudian dicantumkan jaksa dalam dakwaan.
- Tepatnya Rp622.090.207.166,41, berdasarkan pemeriksaan investigatif BPK yang dikutip dalam dakwaan. Dugaan fee 2023

Dugaan fee 2023

- KPK menyebut fee percepatan haji khusus mencapai US\$5.000 per jemaah atau sekitar Rp84,4 juta.

NUSRON DISEBUT DI JEJAK US\$1 JUTA DUGAAN KORUPSI HAJI

BAP Zainal Sebut Uang Ditolak, Gus Alex Yakin Diterima

Nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid kembali muncul dalam perkara hukum. Sebelumnya, nama Nusron mencuat dalam penyidikan KPK terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Kini, namanya disebut dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, terkait uang US\$1 juta yang disebut disiapkan untuk memengaruhi Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR RI 2024. Keterangan mengenai aliran uang tersebut belum menghasilkan satu versi yang sama. Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Komisaris Independen PT Sucofindo Zainal Abidin menyebut Nusron menolak menerima uang yang hendak disampaikan kepadanya. Sementara itu, terdakwa

Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex pada 24 September 2026 mengaku yakin uang US\$1 juta tersebut sampai kepada Nusron melalui sejumlah perantara. Diketahui, Nusron merupakan Ketua Pansus Hak Angket Haji DPR RI 2024. **BERSAMBUNG HAL.11. BERITA TERKAIT HAJI BACA HAL.2**

- Fee disebut berkaitan dengan pengisian kuota haji khusus tambahan.

Dugaan fee 2024

- KPK menyebut nilai fee yang disepakati US\$2.000 per jemaah atau sekitar Rp33,8 juta.
- Pemberian/pengumpulan fee disebut berlangsung Februari–Juni 2024.

US\$1 juta

- Dalam perkara yang berkembang di persidangan, uang ini disebut disiapkan untuk kepentingan Pansus Hak Angket Haji DPR RI 2024.
- KPK menyatakan telah menyita US\$1 juta dari seorang perantara.

- Status apakah uang tersebut benar-benar sampai kepada pihak yang dituju menjadi bagian yang masih didalami.

Nama yang muncul



Yaqut Cholli Qoumas
Mantan Menteri Agama, terdakwa perkara.



Ishfah Abidal Aziz (Gus Alex)
Terdakwa.



Nusron Wahid
Namanya disebut terkait dugaan aliran US\$1 juta, tetapi belum terbukti sebagai penerima.



PRABOWO USUL KOMPOSISI BIAYA HAJI JADI 52:48

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengusulkan perubahan komposisi pembiayaan haji 2027 menjadi 52:48. Usulan itu disampaikan setelah Gus Irfan bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak melaporkan perkembangan penghitungan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) kepada Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9/2026). Skema tersebut ditujukan agar perubahan biaya penyelenggaraan haji tidak menambah beban jemaah secara signifikan. Arah itu mengemuka dalam pertemuan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dengan Menteri Angkatan Bersenjata dan Veteran Prancis Catherine Vautrin di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Irfan Yusuf mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ke depan. Prabowo, sebutnya, menginginkan agar kenaikan komponen biaya haji tak terlalu berdampak kepada jemaah.

"Kami, saya dan Pak Wamen baru saja diterima oleh Presiden. Ada beberapa hal yang kami sampaikan," kata Gus Irfan se usai pertemuan.

Salah satu yang dilaporkan kepada Prabowo ialah hasil penghitungan BPIH yang sebelumnya dibahas Kementerian Haji dan Umrah bersama Komisi VIII DPR.

"Pertama, kami menyampaikan hasil hitung-hitungan kami dengan Komisi VIII DPR tentang BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)," ujar Gus Irfan.

Menurut dia, penghitungan biaya haji 2027 tidak terlepas dari perubahan situasi geopolitik di Timur Tengah yang berdampak terhadap kondisi ekonomi dan sejumlah komponen penyelenggaraan haji.

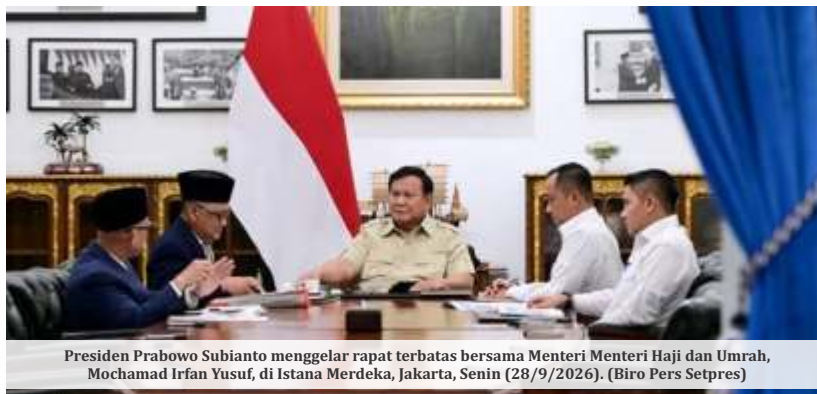
"Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berakibat, berefek ke ekonomi," ucapnya.

Ia mengakui terdapat sejumlah komponen biaya yang harus disesuaikan. Namun, arahan Prabowo adalah perubahan tersebut tidak boleh membuat jemaah menanggung beban yang terlalu besar.

"Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya, Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jemaah," kata Gus Irfan.

Karena itu, Kementerian Haji dan Umrah masih mencari formula pembiayaan baru. "Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda, tapi jemaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar," ujarnya.

Salah satu yang dibahas ialah perubahan komposisi antara Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayar jemaah dan nilai manfaat dana haji yang dikelola Badan Pengelola



Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama Menteri Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/9/2026). (Biro Pers Setpres)

Kuangan Haji (BPKH).

"Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48, sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan kepada jemaah," tandas Gus Irfan. Artinya, angka 52:48 yang disampaikan pemerintah merujuk pada komposisi pembiayaan Bipih dan nilai manfaat; rincian final besaran rupiah serta penerapannya masih harus diformulasikan lebih lanjut.

Usulan itu mengubah skema yang sebelumnya diajukan pemerintah kepada DPR. Dalam rapat kerja bersama Komisi VIII pada 19 Agustus 2026, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH 2027 sebesar Rp107.340.172,02 per jemaah, dengan Bipih Rp42.936.068,81 atau 40 persen dan nilai manfaat Rp64.404.103,21 atau 60 persen. Pada skema tersebut, porsi pembayaran langsung jemaah lebih kecil daripada nilai manfaat yang digunakan untuk menopang biaya penyelenggaraan.

Usulan BPIH 2027 itu lebih tinggi dibandingkan BPIH 2026 yang ditetapkan rata-rata Rp87.409.366 per jemaah. Pemerintah sebelumnya menjelaskan kenaikan sejumlah komponen dipengaruhi antara lain oleh nilai tukar rupiah, harga penerbangan, akomodasi, transportasi serta layanan di Arab Saudi. Untuk penerbangan, pemerintah pada Agustus mengusulkan biaya sekitar Rp40,53 juta, naik dari Rp32,01 juta pada tahun sebelumnya.

Badan Pengelola Keuangan Haji sebelumnya juga mengingatkan bahwa penetapan BPIH 2027 perlu memperhitungkan keterjangkauan jemaah yang akan berangkat sekaligus

keberlanjutan dana haji dan kepentingan jemaah yang masih berada dalam masa tunggu. Per Juli 2026, saldo dana haji tercatat Rp182,34 triliun, sementara nilai manfaat mencapai Rp7,01 triliun.

Antrean Jadi 14 Tahun

Pertemuan Gus Irfan dan Dahnil dengan Prabowo juga membahas persoalan antrean haji. Dahnil mengatakan Kementerian Haji dan Umrah telah memvalidasi 5,7 juta data calon jemaah dan menemukan sekitar 400 ribu data tidak valid. Setelah data tersebut dibersihkan, pemerintah menghitung masa tunggu keberangkatan secara faktual rata-rata menjadi 14 tahun.

Dahnil mengatakan angka tersebut turun dari kondisi sebelumnya. "Sejak Kementerian Haji ada, antrean yang paling lama itu 49 tahun," katanya. Formula yang diterapkan sebelumnya menurunkan rata-rata masa tunggu menjadi 26 tahun. Setelah validasi data, angka faktual yang digunakan pemerintah kini menjadi rata-rata 14 tahun. "Jadi antrean faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49, kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrean faktual haji itu 14 tahun," ujar Dahnil.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan meminta calon jemaah haji 1448 Hijriah/2027 Masehi mulai mempersiapkan kondisi fisik sejak jauh hari. Persiapan kesehatan dinilai penting karena rangkaian ibadah haji membutuhkan mobilitas tinggi, aktivitas fisik yang padat, serta kemampuan beradaptasi dengan kondisi cuaca di Arab Saudi.

SIMULASI BIAYA HAJI 2027

- BPIH 2026: Rp87,41 juta/jemaah
- Usulan BPIH 2027: Rp107,34 juta
- Kenaikan: Rp19,93 juta

Skema usulan 52:48

- Bipih jemaah: Rp55,82 juta
- Nilai manfaat: Rp51,52 juta
- Beban jemaah naik Rp1,62 juta dari 2026
- Nilai manfaat naik Rp18,31 juta

Skema sebelumnya 40:60

- Bipih: Rp42,94 juta
- Nilai manfaat: Rp64,40 juta

Catatan: skema 52:48 masih usulan, belum ditetapkan.

BPIH 2022-2026

2022: Rp97,79 juta

- Jemaah Rp39,89 juta (40,8%)
- Nilai manfaat Rp57,91 juta (59,2%)

2023: Rp90 juta

- Jemaah Rp49,81 juta (55,3%)
- Nilai manfaat Rp40,19 juta (44,7%)

2024: Rp93,41 juta

- Jemaah Rp56,04 juta (60%)
- Nilai manfaat Rp37,36 juta (40%)

2025: Rp89,41 juta

- Jemaah Rp55,43 juta (62%)
- Nilai manfaat Rp33,98 juta (38%)

2026: Rp87,40 juta

- Jemaah Rp54,19 juta (62%)
- Nilai manfaat Rp33,21 juta (38%)



"Kesehatan ini tidak kalah penting. Ibadah haji memerlukan fisik yang prima. Karena masih ada waktu sekitar enam sampai tujuh bulan, saya berharap mulai sekarang jemaah sudah mempersiapkan kesehatan dan kondisi fisiknya," kata Gus Irfan dalam keterangannya, Senin (28/9/2026).

Gus Irfan meminta calon jemaah mulai membiasakan diri berolahraga, terutama berjalan kaki secara rutin. Latihan fisik sejak dini, menurut dia, diperlukan agar tubuh lebih siap menghadapi aktivitas selama berada di Tanah Suci.

"Mulai hari ini latihan fisik. Setiap hari bisa dibiasakan berjalan kaki. Kita harus mempersiapkan diri karena kondisi di Arab Saudi juga membutuhkan ketahanan fisik yang baik," ujarnya.

Peringatan tersebut bukan tanpa alasan. Gus Irfan mengatakan terdapat sekitar 345 calon jemaah pada pelaksanaan haji sebelumnya yang harus dipulangkan setelah kembali menjalani pemeriksaan kesehatan di asrama haji embarkasi. Kondisi kesehatan mereka dinilai tidak memenuhi persyaratan untuk melanjutkan keberangkatan. (wid,ist,kum/dya)

Ambang Batas Parlemen 2029

GKSR TAWARKAN 1%, PARTAI DI DPR DORONG 5-7%

Perdebatan mengenai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) untuk Pemilu 2029 memasuki babak baru. Delapan partai politik nonparlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) mengusulkan PT ditetapkan hanya 1 persen. Di sisi lain, sejumlah partai yang memiliki kursi di DPR mendorong angka 5 hingga 7 persen.

Usuran GKSR akan dituangkan dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu diserahkan kepada pimpinan DPR pada Selasa (29/9/2026).

Delapan partai yang tergabung dalam GKSR ialah Partai Perindo, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Buruh, Partai Ummat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), dan Partai Berkarya.

Ketua Umum GKSR sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan naskah akademik setebal sekitar 200 halaman itu memuat 30 isu kepegiluan. Dokumen tersebut disusun setelah GKSR berdiskusi dengan sejumlah tokoh dan pegiat pemilu selama setahun terakhir.

"Kami mengadakan launching naskah akademik sekaligus sandingan revisi Undang-Undang Pemilu yang sedang dibahas oleh partai parlemen di DPR," kata Said dalam peringatan HUT pertama GKSR di Jakarta.

Menurut Said, salah satu pokok utama usulan GKSR adalah PT 1 persen. Angka itu, kata dia, merujuk penelitian para aktivis kepegiluan, termasuk Perludem, dengan menggunakan rumus Taagepera.

"Parliamentary threshold adalah 1 persen, dengan tetap mempertimbangkan fraksi gabungan di tingkat nasional DPR RI dan/atau stembus accord dalam pemilihan yang dilakukan sebelum pemilu atau di awal, bukan sesudah," ujarnya.

GKSR juga mengusulkan perubahan mekanisme verifikasi partai politik. Partai yang sudah memiliki kursi di DPR cukup melakukan pendaftaran tanpa menjalani verifikasi administrasi maupun faktual.

Sementara partai nonparlemen yang telah mengikuti verifikasi administrasi dan faktual pada pemilu sebelumnya diusulkan cukup menjalani verifikasi administrasi. Adapun partai yang baru pertama kali menjadi peserta pemilu tetap diwajibkan melalui verifikasi administrasi dan faktual.

Said meminta partai politik di parlemen tidak menutup pembahasan RUU Pemilu dari partai nonparlemen. Ia mengaitkan tuntutan tersebut dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Dalam putusan tersebut, MK menyatakan PT 4 persen dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tetap konstitusional untuk Pemilu 2024,



Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) akan menyerahkan draf perubahan aturan Pemilu, parliamentary threshold (PT) 1 persen menjadi poin utama. (ist)

tetapi menjadi konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya. MK mensyaratkan pembentuk undang-undang mengubah norma dan besaran PT dengan berpedoman pada sejumlah parameter yang ditentukan dalam putusan.

"Bilamana ini tidak dijalankan, bisa dipastikan begitu diketuk, langsung kita judicial review," kata Said.

Perdebatan PT bukan sekadar soal angka. Ambang batas menentukan apakah suara yang diperoleh sebuah partai dapat diperhitungkan dalam proses pembagian kursi DPR.

Pada Pemilu 2024, ketika PT masih 4 persen, terdapat sekitar 17,3 juta suara dari 10 partai yang tidak lolos ke DPR sehingga tidak dikonversi menjadi kursi.

Data tersebut menjadi salah satu latar perdebatan mengenai apakah ambang batas perlu diturunkan atau justru dinaikkan.

Bagi kelompok yang mendorong PT rendah, persoalannya adalah memperkecil suara pemilih yang tidak menghasilkan keterwakilan di DPR. GKSR, misalnya, menyatakan tidak boleh ada suara rakyat yang kehilangan konsekuensi keterwakilan politik.

Sekjen Hanura Benny Ramdhani mengatakan sikap tersebut menjadi alasan utama GKSR memperjuangkan angka 1 persen.

"Intinya semua sepakat bahwa tidak boleh dalam satu pemilu, dalam memperjuangkan prinsip demokrasi yang disebut kedaulatan rakyat, jadi tidak ada suara rakyat yang akhirnya tidak memiliki suara atau keterwakilan di DPR," kata Benny di Jakarta, Minggu (27/9/2026).

Sebaliknya, pihak yang mendorong angka lebih tinggi menempatkan

penyederhanaan sistem kepartaian dan efektivitas parlemen sebagai salah satu pertimbangan.

MK sendiri dalam Putusan 116/PUU-XXI/2023 menyoroti persoalan PT 4 persen dalam kaitannya dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan kepastian hukum. MK meminta pembentuk undang-undang mengubah norma dan besaran PT untuk Pemilu 2029 dengan parameter yang telah ditetapkan.

Bagi partai-partai nonparlemen, besaran PT akan menentukan salah satu pintu menuju keterwakilan di DPR pada Pemilu 2029. Karena itu, GKSR meminta mereka dilibatkan dalam pembahasan revisi UU Pemilu.

Benny mengatakan GKSR telah berdiskusi dengan sejumlah tokoh, antara lain Yusril Ihza Mahendra, Mahfud MD, dan pegiat pemilu Titi Anggraini dari Perludem.

GKSR dijadwalkan bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada Selasa (29/9/2026), bersamaan dengan rencana penyerahan naskah akademik RUU Pemilu.

Benny menilai kesediaan Dasco menerima pimpinan partai nonparlemen membuka ruang dialog antara partai di parlemen dan partai di luar parlemen.

"Walaupun mereka berada di partai yang hari ini berkuasa, bahkan ada di parlemen, tapi tetap memberikan tempat dan ruang untuk kita berdiskusi," kata Benny.

Ketua Dewan Pembina GKSR Oesman Sapta Odang (OSO) dalam peringatan HUT pertama organisasi tersebut juga menekankan pentingnya pembangunan daerah.

"Daerah itu yang mendirikan republik, jadi perhatian kepada daerah

PERKEMBANGAN AMBANG BATAS PARLEMEN DI INDONESIA

Pemilu 2009 (2,5%)

Diterapkan pertama kali melalui UU No. 10 Tahun 2008 hanya untuk tingkat DPR RI.

Pemilu 2014 (3,5%)

Angka ambang batas dinaikkan untuk menyederhanakan jumlah partai politik di parlemen.

Pemilu 2019 (4,0%)

Batas minimal naik lagi menjadi 4% dalam pemilu serentak pertama.

Pemilu 2024 (4,0%)

Menggunakan persentase yang sama dengan Pemilu 2019.

Pemilu 2029 (Akan Berubah)

Angka 4% dinyatakan konstitusional bersyarat oleh MK (Putusan No. 116/PUU-XXI/2023) dan harus diubah sebelum Pemilu 2029 agar tidak banyak suara rakyat yang terbuang.



harus kita lakukan lahir batin," ujar OSO.

Ia menambahkan pembangunan daerah dibutuhkan untuk mencapai kemakmuran, tetapi mengingatkan agar perhatian kepada daerah tidak berubah menjadi daerahisme.

"Dengan catatan, bukan daerahisme, daerahisme itu tidak baik," tegasnya.

Usulan 1 persen tersebut berhadapan dengan sejumlah gagasan dari partai politik yang kini memiliki kursi di DPR.

Golkar sebelumnya menyatakan angka 5 persen sebagai usulan yang dianggap sesuai. Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan pembicaraan lintas partai menunjukkan adanya beberapa angka yang berkembang, termasuk 5, 6, dan 7 persen.

"Kalau parliamentary threshold dalam komunikasi kita dengan lintas partai, memang ada yang menginginkan, ada 6, ada 7, ada 5, ada di bawah itu juga, tetapi mungkin angka ideal ya, angka ideal itu 5 cocoklah ya," kata Bahlil pada 17 September 2026. (gus,ist,kum/dya)

FAKTA MACET KETAPANG-GILIMANUK

- 17 km panjang antrean kendaraan di sisi Ketapang.
- 3 hari tenggat warga kepada ASDP.
- 35 → 15 menit target pemangkasan waktu bongkar-muat kapal.
- >50% proyeksi kenaikan kapasitas angkut dalam 24 jam.
- 20% penurunan kapasitas akibat pengerjaan dermaga.
- 58 kapal total armada yang tersedia menurut Gapasdap.
- 23 kapal/40% armada yang dapat beroperasi saat MB 2 Gilimanuk diperbaiki.
- LCM diarahkan untuk truk besar.
- MB 1-4 diarahkan untuk kendaraan kecil.
- Nataru target peningkatan kapasitas sebelum periode liburan.



WARGA BERI ASDP WAKTU 3 HARI URAI MACET 17 KM KETAPANG

Kemacetan di jalur menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, belum juga terurai. Antrean kendaraan yang didominasi angkutan logistik mencapai sekitar 17 kilometer pada Senin (28/9/2026). Kondisi itu memicu aksi warga yang mendatangi kantor PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ketapang. Mereka meminta ada solusi dalam waktu tiga hari ke depan.



Atasi antrean Ketapang-gilimanuk, otoritas pelabuhan dan sopir truk sepakati pengalihan truk di atas 30 ton ke dermaga LCM. (Dok.ant)

Warga memprotes kemacetan yang dinilai telah mengganggu aktivitas harian, aksesibilitas warga, hingga perekonomian. Warga memberikan waktu tiga hari kepada ASDP untuk mengatasi persoalan tersebut. Jika tidak ada solusi, mereka mengancam menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.

Perwakilan warga, Slamet Purwantono alias Panjul, mengatakan tenggat tersebut merupakan hasil koordinasi warga dengan pihak pengelola pelabuhan.

"Kami berkomitmen dengan pihak ASDP untuk 3 hari menyelesaikan terkait dengan permasalahan ini. Tiga hari tidak ada solusi kemacetan, akan kami datangkan massa lebih besar lagi," ujar Panjul saat ditemui di lokasi, Senin (28/9/2026).

Menurut Panjul, dampak kemacetan tidak sebatas kendaraan yang tertahan di jalan. Warga mengalami kerugian ekonomi dan kesulitan mengakses layanan penting.

"Rugi secara ekonomi dan aksesibilitas, bahkan, ada warga sakit yang meninggal karena tidak bisa diantar pakai ambulans," katanya.

Laporan kepadatan lalu lintas menuju Ketapang telah muncul sejak akhir pekan. Suara Surabaya melaporkan antrean pada Senin pagi

mencapai sekitar 14 kilometer, sementara pantauan lain menunjukkan kepadatan hingga sekitar 17 kilometer dari pelabuhan. Antrean didominasi truk dan menghambat arus kendaraan di kedua arah.

ASDP mengatakan memahami keresahan masyarakat dan pengguna jasa yang terdampak. Perusahaan menyatakan fokus pada percepatan pemulihan layanan, tetapi tetap mempertahankan aspek keselamatan pelayaran.

General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ketapang, Media Syahrianto, mengatakan antrean di sisi Ketapang tercatat sekitar 17 kilometer dan didominasi kendaraan logistik.

"Di sisi Ketapang, antrean tercatat sekitar 17 kilometer dan didominasi kendaraan logistik. Sementara di sisi Gilimanuk, proses penguraian terus dilakukan melalui optimalisasi armada, peningkatan frekuensi perjalanan, serta penyesuaian pola operasi," ujar Media.

ASDP juga menyoroti karakteristik kendaraan logistik yang melintas. Sejumlah kendaraan terindikasi melebihi ketentuan dimensi maupun muatan atau over dimension over loading (ODOL).

"ASDP mencatat kendaraan logistik yang melintas memiliki

karakteristik dimensi dan muatan yang beragam, termasuk kendaraan yang terindikasi melebihi ketentuan dimensi maupun muatan. Kondisi tersebut turut memengaruhi pengaturan dan pemuatan kendaraan ke kapal karena harus disesuaikan dengan kapasitas dan karakteristik kapal serta aspek keselamatan," jelasnya.

Karena itu, penataan antrean diperketat sejak kendaraan berada di kantong parkir hingga proses boarding. ASDP melibatkan kepolisian, regulator, operator kapal, dan instansi terkait dalam pengaturan tersebut.

Namun, persoalan kemacetan tidak hanya berkaitan dengan antrean kendaraan di jalan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyebut salah satu pemicu awal adalah kebijakan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) terkait pembatasan jumlah truk yang dapat dimuat ke kapal atas pertimbangan keselamatan.

Menurut Emil, kebijakan tersebut kemudian memicu blokade oleh sejumlah sopir kendaraan logistik pada Sabtu (26/9/2026). Blokade berlangsung lebih dari enam jam sebelum dibuka sekitar pukul 20.00 WIB. Efek penumpukan kendaraan dari peristiwa itu masih terasa hingga Senin. "Ternyata blokade ini tidak semata-mata antrean tetapi kebijakan

KSOP yang berkaitan jadi ini kebijakan otoritas pelabuhan kementerian perhubungan berkaitan dengan batasan jumlah truk yang bisa dinaikkan dalam kapal," kata Emil.

"Sudah ada solusinya. Namun emikian, karena terjadi blokade lebih dari 6 jam mengurainya efeknya itu sampai kemarin bahkan sampai hari ini," lanjutnya.

Emil juga menyoroti perilaku sebagian pengemudi yang mengambil jalur berlawanan arah atau ngeblong. Menurut dia, tindakan tersebut membuat arus lalu lintas semakin ruwet dan memperpanjang antrean.

"Harusnya kalau kayak begini harusnya enggak 13 kilo ngantrinya kan? Karena banyak yang ngeblong. Yang ngeblong ya? Ngambil jalur lawan arah. Jadi ruwet di sananya," ujarnya.

Di tengah kemacetan, sejumlah langkah untuk meningkatkan kapasitas penyeberangan mulai disepakati. Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan regulator, ASDP, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), serta pengusaha kapal menyepakati pemangkasan waktu bongkar muat. (mok,ist,ant/dya)

KPK TEMUKAN REKENING PENAMPUNG SETORAN KANTAH DI JATIM

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) yang rekeningnya diduga digunakan untuk menampung setoran dari sejumlah Kantor Pertanahan (Kantah) di Jawa Timur. Temuan tersebut didapat penyidik saat mengeledah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Jawa Timur di Surabaya pada Kamis, 24 September 2026. Pengeledahan itu merupakan bagian dari pengembangan perkara dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Agraria

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan rekening-rekening tersebut diduga menjadi tempat penampungan uang yang disetorkan oleh Kantah di lingkungan Kanwil BPN Jawa Timur.

"Selain ditemukan sejumlah uang dan perhiasan, penyidik juga menemukan sejumlah ATM, yang rekeningnya digunakan untuk penampungan dugaan setoran-setoran yang dilakukan oleh kantah BPN di lingkungan Kanwil Jawa Timur," kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/9).

KPK belum mengungkapkan jumlah uang yang berada dalam rekening-rekening tersebut maupun siapa pemilik rekening. Penyidik masih menelusuri mekanisme pengumpulan uang dan pihak-pihak yang terlibat.

Budi mengatakan uang yang terkumpul itu diduga tidak digunakan untuk kegiatan yang bersumber dari anggaran resmi pemerintah.

"Uang-uang yang dikumpulkan diduga untuk kegiatan-kegiatan taktis di luar APBN dari DIPA pada Kanwil BPN Jawa Timur," ujarnya.

Temuan rekening tersebut memperluas dugaan praktik pengumpulan uang di lingkungan BPN Jawa Timur. Sehari sebelumnya, Minggu (27/9), Budi mengungkapkan KPK menduga sejumlah Kantah di Jawa Timur menyetor uang kepada pihak tertentu di Kanwil BPN Jawa Timur.

"Ada dugaan kantah-kantah di wilayah tersebut setor uang ke oknum di Kanwil BPN Jatim," kata Budi.

Dugaan itu muncul setelah penyidik menemukan uang tunai dalam rupiah dan mata uang asing dengan nilai keseluruhan sekitar ratusan juta rupiah ketika mengeledah Kanwil BPN Jawa Timur. KPK menyebut uang tersebut diduga tidak hanya berasal dari penerimaan terkait layanan pertanahan, tetapi juga dari setoran Kantah di Jawa Timur.

Selain uang tunai, penyidik menemukan perhiasan yang diduga emas. Nilai perhiasan tersebut diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah, meski keasliannya masih akan diperiksa. KPK juga menemukan uang dalam pecahan dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura.



Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Pengeledahan di Kanwil BPN Jawa Timur dilakukan dua hari setelah KPK menyisir Kantor Pertanahan Kota Mojokerto pada Rabu, 23 September 2026. Dalam pengeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah amplop berisi uang yang diduga berasal dari para pemohon layanan pertanahan.

"Penyidik juga mengamankan sejumlah amplop berisi uang, yang diduga merupakan uang-uang yang diterima dari para pemohon layanan pertanahan di lingkungan BPN Kota Mojokerto," kata Budi pada Kamis (24/9).

Jumlah uang dalam amplop tersebut saat itu belum diumumkan karena masih dalam proses penghitungan. Penyidik juga membawa sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara.

Kini KPK mendalami dua jalur dugaan pengumpulan uang di lingkungan BPN Jawa Timur. Pertama, dugaan setoran dari internal, yakni dari Kantah-Kantah kepada pihak tertentu di Kanwil BPN Jatim. Kedua, dugaan penerimaan dari pihak eksternal yang berkaitan dengan layanan pertanahan.

"Tentu penyidik masih akan terus mendalami praktik-praktik pengumpulan yang dilakukan baik pengumpulan yang dilakukan di internal, artinya dugaan setoran dari para kantah di lingkungan BPN Jawa Timur, ataupun setoran-setoran yang diberikan dari pihak eksternal yang berkaitan dengan layanan pertanahan," kata Budi.

Perkara tersebut merupakan

pengembangan dari OTT KPK di kawasan Jabodetabek pada Senin, 14 September 2026. OTT itu berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan.

KPK kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka ialah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, dan Rizal Pahlevi dari pihak swasta.

Lima tersangka lainnya yang disebut dalam rangkaian perkara tersebut adalah Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, Muhammad Fakhry, serta satu nama lainnya dalam daftar tersangka KPK. KPK sebelumnya menyebut sebagian pihak swasta dalam perkara tersebut memiliki hubungan dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Para tersangka telah ditahan sejak 15 September 2026.

Dalam OTT tersebut, KPK menyita uang tunai sekitar Rp106,3 miliar. Setelah OTT, penyidik bergerak melakukan pengeledahan di sejumlah lokasi untuk mencari dan melengkapi alat bukti. Pada 17 September, misalnya, KPK mengeledah sejumlah ruangan di Kementerian ATR/BPN. Penyidik membawa dokumen dan barang bukti

JEJAK KASUS ATR/BPN DARI OTT KE REKENING PENAMPUNG

14 SEPTEMBER : OTT KPK

KPK melakukan OTT terkait dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

15 SEPTEMBER : 8 TERSANGKA

KPK menetapkan 8 tersangka, termasuk pejabat ATR/BPN dan pihak PT Summarecon. KPK menyebut beberapa tersangka diduga orang kepercayaan Nusron Wahid.

17 SEPTEMBER : ATR/BPN DIGELEDAH

KPK mengeledah sejumlah ruangan di Kementerian ATR/BPN. Ruangan Nusron Wahid tidak digeledah.

18-21 SEPTEMBER : SUMMARECON

Pengeledahan berlanjut ke kantor PT Summarecon di Jakarta dan Kabupaten Bogor.

23 SEPTEMBER : KANTAH MOJOKERTO

KPK menemukan amplop berisi uang yang diduga terkait layanan pertanahan.

24 SEPTEMBER : BPN JATIM

KPK menemukan uang tunai, USD, SGD, perhiasan diduga emas, serta dokumen dan barang bukti elektronik.

27 SEPTEMBER : DUGAAN SETORAN

KPK menduga sejumlah Kantah di Jatim menyetor uang kepada oknum di Kanwil BPN Jatim.

28 SEPTEMBER : REKENING PENAMPUNG

KPK menemukan kartu ATM yang diduga terkait rekening penampung setoran dari sejumlah Kantah.



elektronik yang berkaitan dengan proses serta mekanisme layanan pertanahan.

Rangkaian pengeledahan kemudian berlanjut ke kantor PT Summarecon Agung Tbk di Jakarta, rumah tersangka Lampri, kantor Summarecon di Kabupaten Bogor, Kantor Pertanahan Kota Mojokerto, hingga Kanwil BPN Jawa Timur. (tin,ist,kum,rls/dya)

Sopir Angkot Tuntut Kompensasi Trans Jatim Malang Raya



Angkutan kota (Angkot) berkumpul di depan Kantor DPRD Kota Malang, Senin (28/9/2026).
(Santi/Lentera)

MALANG - Keberadaan Trans Jatim Koridor I Malang Raya kembali dipersoalkan oleh sopir angkutan kota (angkot). Selain menyoroti minimnya pelibatan mereka, skema dan transparansi kompensasi bagi pihak terdampak dinilai belum jelas.

"Kami sebenarnya menyampaikan tuntutan ini sudah sejak Juli 2026. Salah satu yang dipermasalahkan

adalah kami menilai kurangnya sosialisasi dan edukasi. Bahkan di sini banyak dari 15 jalur, itu 75 persennya tidak diajak bicara," ujar Ketua Front Front Aliansi Sopir Angkutan Malang (ASAM), Budi Andrianto, Senin (28/9/2026).

Menurutnya, dari sekitar 494 sopir angkot di Malang Raya, tidak seluruhnya dilibatkan dalam proses perumusan Trans Jatim Koridor I Malang Raya. Budi mengatakan, Front

ASAM setidaknya membawa 5 tuntutan. Pertama, mereka meminta notulensi pertemuan di tingkat Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur yang disebut berlangsung pada 29 Juli 2026.

Kedua, mereka meminta dugaan maladministrasi dalam proses tersebut diusut. Ketiga, sopir angkot

Malang Raya meminta dilibatkan secara keseluruhan dalam program pemerintah yang berkaitan dengan transportasi publik.

Tuntutan berikutnya adalah keterbukaan blueprint atau rancangan program Trans Jatim. Budi mengatakan, pihaknya ingin mengetahui secara jelas arah program tersebut, termasuk dampaknya terhadap keberadaan angkot di Malang Raya.

"Teman-teman meminta blueprint dari program Trans Jatim itu seperti apa. Karena kami perlu tahu, selama ini tidak tahu, makanya kami merasa banyak kecolongan," katanya.

Front ASAM juga menyebut adanya dugaan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan Organda dan sebagian sopir yang dinilai tidak melibatkan sopir lainnya. Namun, dugaan tersebut masih berupa pernyataan dari pihak Front ASAM dan belum dibuktikan. Tuntutan kelima berkaitan dengan transparansi anggaran kompensasi bagi sopir angkot yang terdampak keberadaan layanan Trans Jatim.

Tak puas menyampaikan aspirasi di Kantor Dishub Kota Malang. Terpantau pada pukul 13.25 WIB,

puluhan sopir angkot menggeruduk Kantor DPRD Kota Malang.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra mengatakan, persoalan kompensasi bagi sopir angkot telah menjadi bagian dari pembahasan bersama pemerintah provinsi.

Menurut Widjaja, dalam peluncuran Trans Jatim terdapat skema kompensasi yang diberikan oleh Pemprov Jatim. Sementara dari Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, kompensasi diberikan melalui program angkutan pelajar. "Itu bagian dari kebijakan yang berpihak kepada teman-teman sopir angkot," kata Widjaja.

Ia menilai keberadaan angkutan pelajar dapat memberikan tambahan pemasukan bagi sopir angkot yang sebelumnya tidak mendapatkan pendapatan dari layanan tersebut. "Dengan adanya angkutan pelajar, mereka dapat nilai tambah. Ini sangat membantu," ujarnya.

Selain itu, menurut Widjaja, pemerintah provinsi juga telah memberdayakan sebagian sopir angkot untuk menjadi pengemudi Trans Jatim Koridor I Malang Raya. (Santi/Dya)

DPRD Soroti Biaya Operasional 7 Videotron Pemkab Malang Tembus Rp296 Juta

MALANG - Tujuh videotron milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang membutuhkan biaya operasional sekitar Rp296 juta setiap tahun. Sayangnya, menurut DPRD aset tersebut belum optimal menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kami mendorong agar tujuh videotron milik pemerintah daerah tersebut dikaji pemanfaatannya sehingga tidak hanya menjadi aset yang membutuhkan biaya perawatan dan operasional, tetapi juga berpotensi memberikan pemasukan bagi daerah," ujar Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza, dikutip pada Senin (28/9/2026).

Menurutnya, salah satu opsi yang dapat dikaji adalah pemanfaatan videotron melalui skema penyewaan atau kerja sama dengan pihak lain. Dengan demikian, videotron dapat digunakan untuk menayangkan materi komersial dan berpotensi memberikan kontribusi terhadap PAD.

Namun, skema pemanfaatan tersebut masih membutuhkan kajian lebih lanjut. Hingga kini, belum ada

riset atau kajian yang secara khusus menghitung potensi pendapatan daerah dari pemanfaatan tujuh videotron tersebut.

"Bapenda sebagai leading sector agar bisa mengawal supaya tujuh videotron ini bisa dimanfaatkan dan menjadi bagian dari PAD," katanya.

Berdasarkan data Pemkab Malang, kata Faza, biaya perawatan tujuh videotron yang dikeluarkan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mencapai sekitar Rp140 juta per tahun. Sementara itu, biaya listrik yang dikeluarkan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) diperkirakan mencapai sekitar Rp156 juta per tahun.

"Jika digabungkan, biaya perawatan dan listrik tujuh videotron tersebut mencapai sekitar Rp296 juta setiap tahunnya," paparnya.

Karena itu, DPRD meminta pemerintah daerah menghitung secara lebih terukur potensi penerimaan yang dapat diperoleh dari aset tersebut. Faza mengatakan, setidaknya pendapatan yang

dihasilkan nantinya diharapkan mampu menutup biaya operasional yang selama ini dikeluarkan. "Idealnya, pendapatan bisa lebih dari biaya operasional," katanya.

DPRD Kabupaten Malang selanjutnya memberikan waktu sekitar 2 bulan kepada Pemkab Malang untuk menyampaikan hasil kajian mengenai skema kerja sama dan potensi pendapatan dari pemanfaatan tujuh videotron tersebut.

Hasil kajian ditargetkan sudah dapat dipaparkan kembali kepada DPRD sebelum pembahasan anggaran dalam APBD 2027.

Kajian tersebut nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai skema pemanfaatan aset, mekanisme kerja sama, serta besaran potensi

pendapatan yang dapat diperoleh pemerintah daerah.

Sementara itu, berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang, realisasi pajak reklame hingga Semester I 2026 mencapai sekitar Rp1,31 miliar atau sekitar 25 persen dari target Rp5,1 miliar. (Santi/Dya)



Ilustrasi: Videotron milik Pemkab Malang di wilayah Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. (foto: Diskominfo Kabupaten Malang)

NETANYAHU DIAM-DIAM TEMUI MBZ, SINGGUNG SERANGAN 7 OKTOBER

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diam-diam terbang ke Abu Dhabi dan bertemu Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Pertemuan berlangsung sekitar satu jam dan disebut menyinggung laporan bahwa MBZ pernah memperingatkan Netanyahu soal rencana serangan Hamas sebelum 7 Oktober 2023.

Tump mengatakan proposal tersebut telah diajukan Iran melalui mediator, tetapi tidak dapat diterima Washington. Dalam pernyataannya kepada wartawan di Gedung Putih pada Sabtu (26/9), Trump juga mengklaim AS masih menguasai Selat Hormuz.

"Kami memegang kendali penuh atas Selat Hormuz. Minyak dalam jumlah besar keluar dari Selat Hormuz. Tadi malam, ada 29 kapal yang melintas keluar," kata Trump, seperti dikutip Reuters Minggu (27/9).

Trump mengakui Iran memang mengajukan kesepakatan untuk membuka kembali jalur pelayaran tersebut. Namun, ia menolak tawaran yang disampaikan Teheran.

"Saya juga senang membuat kesepakatan, tetapi kesepakatan itu tidak akan bisa diterima," ujar Trump.

Dalam laporan tersebut, Trump juga mengatakan, "Mereka mengajukan proposal, tetapi saya menolaknya." Ia menilai Iran ingin segera membuka Selat Hormuz karena berada dalam tekanan ekonomi. Menurut Trump, blokade angkatan laut AS di Hormuz semakin memberikan tekanan ekonomi terhadap Iran.

Proposal Iran sebelumnya disampaikan melalui Qatar. Teheran menawarkan pembukaan kembali Selat Hormuz dalam waktu tujuh hari apabila Washington menerima sejumlah persyaratan yang diajukan.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan skema itu



Anak usia sekolah memulai tahun ajaran 2026/2027 di Jalur Gaza yang masih dikepung konflik (dok.UNRWA)

dirancang dalam beberapa tahap. AS lebih dulu harus melakukan sejumlah langkah yang membutuhkan waktu sekitar empat sampai lima hari. Pada hari keenam, Selat Hormuz akan dibuka. Hari berikutnya, pembicaraan dengan AS mengenai kesepakatan final akan dimulai.

Iran menyatakan pembukaan selat

tersebut merupakan bagian dari rancangan penyelesaian konflik yang lebih luas. Setelah jalur pelayaran dibuka, pembicaraan dengan AS akan dilanjutkan untuk membahas kesepakatan final mengenai sejumlah persoalan yang telah disepakati.

Namun, terdapat perbedaan antara pernyataan publik Trump dan posisi

mediator. Araghchi mengatakan mediator yang menjembatani komunikasi Iran-AS belum secara resmi menyampaikan penolakan Washington kepada Teheran.

"Kami menunggu para mediator menyampaikan pandangan definitif mereka kepada kami, dan kami akan mengambil keputusan berdasarkan itu," kata Araghchi.

Dalam perkembangan terbaru pada Minggu (27/9), Araghchi kembali menegaskan bahwa pembukaan Selat Hormuz bergantung pada terpenuhinya persyaratan Iran.

"Persyaratan kami jelas. Setiap langkah menuju pembukaan kembali Selat Hormuz bergantung pada terpenuhinya persyaratan tersebut," kata Araghchi. Ia menambahkan bahwa hanya solusi melalui perundingan yang dapat mengakhiri kebuntuan.

Persoalannya bukan hanya soal kapan kapal-kapal dapat kembali melintasi Hormuz. Proposal Iran juga menyentuh sejumlah persoalan ekonomi dan politik yang menjadi sumber konflik dengan Washington.

Mengacu pada rancangan kesepakatan sebelumnya, Iran meminta adanya jalur pelayaran bebas di Selat Hormuz selama 60 hari yang disertai perundingan perdamaian. Teheran juga meminta pencairan aset Iran yang dibekukan di luar negeri, kompensasi biaya perang, otorisasi pelayaran di masa depan, serta pencabutan sanksi dan blokade. (gus,ist,rtr,ant/dya)

Cabut Status Diplomat Belanda di Ramallah

ISRAEL memutuskan mencabut status diplomatik para diplomat Belanda yang mewakili negaranya di Otoritas Palestina di Ramallah. Keputusan itu diumumkan pada Minggu (27/9/2026) sebagai respons atas kebijakan Belanda yang menjatuhkan sanksi terhadap permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki.

Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar mengatakan para diplomat Belanda di Ramallah harus mengembalikan dokumen diplomatik yang diterbitkan Israel dalam waktu tujuh hari. Setelah batas waktu tersebut, hak istimewa dan kekebalan diplomatik mereka akan berakhir. "Negara mana pun yang bertindak secara bermusuhan dan sepihak terhadap Israel akan kehilangan pengaruh serta relevansinya di kawasan ini," kata Sa'ar, seperti dikutip Reuters.

Keputusan Israel itu berkaitan dengan larangan Belanda terhadap

impor barang yang diproduksi di permukiman Israel di Tepi Barat. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada pekan lalu. Belanda menjadi salah satu dari sejumlah negara yang mengambil langkah terhadap aktivitas ekonomi di permukiman Israel yang berada di wilayah Palestina yang diduduki.

Hubungan kedua negara juga sebelumnya mengalami ketegangan. Pada Agustus 2026, Israel melarang diplomat Belanda mengakses pusat koordinasi bantuan untuk Gaza yang dipimpin Amerika Serikat dan berlokasi di Israel. Saat itu, Sa'ar menyebut langkah tersebut sebagai respons terhadap sejumlah tindakan yang dianggap Israel sebagai langkah anti-Israel.

Belanda selama ini, seperti sejumlah negara lain, menempatkan diplomat yang menangani hubungan dengan Otoritas Palestina di Ramallah, meski para diplomat tersebut tinggal di Yerusalem Timur. Israel memberikan akreditasi kepada

mereka sekaligus hak istimewa dan kekebalan diplomatik berdasarkan Konvensi Wina mengenai hubungan diplomatik. Pada bulan ini, Israel juga memerintahkan penutupan Konsulat Inggris di Yerusalem Timur setelah London memberlakukan larangan serupa terhadap barang-barang dari permukiman Israel.

Francis dan Kanada sebelumnya turut mengumumkan kebijakan pembatasan impor barang dari permukiman, tetapi sejauh ini belum mendapat tindakan serupa dari Israel.

Ketegangan tersebut berlangsung ketika pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghadapi tekanan diplomatik terkait kebijakannya di Gaza dan Tepi Barat.

Dua menteri sayap kanan dalam kabinetnya, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, juga telah dikenai sanksi oleh sejumlah negara. Spanyol, Irlandia, dan beberapa negara lain turut memberlakukan pembatasan terhadap barang yang berasal dari permukiman Israel. (tin,rtr/dya)

Perdana Menteri Israel

BENJAMIN NETANYAHU

ACHA SEPTRIASA BLACKOUT USAI MARATON, APA YANG TERJADI PADA TUBUH PELARI?

Menyelesaikan maraton sejauh 42 kilometer bukan hanya menguji daya tahan otot. Tubuh juga menghadapi kehilangan cairan dan elektrolit, peningkatan suhu, penggunaan cadangan energi, serta perubahan sirkulasi darah. Karena itu, kondisi tubuh setelah garis finis tetap perlu diperhatikan.

Aktris Acha Septriasa mengalami hal tersebut setelah menyelesaikan maraton pertamanya di Sydney, Australia. Ia mengaku sempat mengalami blackout atau kehilangan kesadaran ketika tiba di rumah. Saat itu, ia berada berdua dengan putrinya, Bridgia Kalina Kharisma.

"Kemarin pas lagi aku tinggal sama Bri berdua selesai maraton, aku ingat banget aku sempat blackout gitu," kata Acha Septriasa saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan.

Acha menduga kondisi itu berkaitan dengan kombinasi aktivitas fisik berat, cuaca, kurang minum, dan terlambat mendapatkan asupan setelah berlari. Ia juga menyebut pengalaman tersebut merupakan kali pertamanya menempuh jarak 42 kilometer.

"Jadinya karena memang mungkin baru pertama kali lari 42 kilo. Gak tahu gitu rasanya badan mungkin ada heartstroke-nya juga, mungkin badan juga ngerasanya kurang minum dan juga gak langsung makan protein, jadinya lemah banget waktu itu. Akhirnya aku ya gitu, blackout di depan kamar, jatuh," tuturnya.

Istilah yang digunakan Acha, heartstroke, perlu dibedakan dari heat stroke atau sengatan panas. Dari cerita tersebut saja, penyebab pingsannya tidak dapat dipastikan. Kehilangan kesadaran setelah olahraga berat dapat terjadi karena sejumlah mekanisme, mulai dari dehidrasi dan kelelahan hingga penurunan tekanan darah setelah berhenti berlari secara tiba-tiba. American Heart Association (AHA) menyebut keringat berlebihan, kelelahan, dan perubahan posisi tubuh sebagai sejumlah pemicu pingsan. Namun, pingsan yang terjadi saat berolahraga juga dapat berkaitan dengan gangguan jantung dan perlu dievaluasi secara medis.

Mengapa Ambruk Setelah Finis?

Fenomena pingsan atau exercise-associated collapse cukup dikenal dalam kedokteran olahraga. Mayo Clinic menjelaskan bahwa kondisi ini dapat terjadi ketika pelari berhenti setelah berlari dalam waktu lama. Saat otot berhenti berkontraksi, darah



Foto-foto :
Instagram @septriasaacha

“Jadinya karena memang mungkin baru pertama kali lari 42 kilo. Gak tahu gitu rasanya badan mungkin ada heartstroke-nya juga, mungkin badan juga ngerasanya kurang minum dan juga gak langsung makan protein, jadinya lemah banget waktu itu. Akhirnya aku ya gitu, blackout di depan kamar, jatuh,”

Acha Septriasa

dapat lebih banyak berkumpul di tungkai sehingga tekanan darah turun dan aliran darah ke otak berkurang. Akibatnya, pelari dapat mengalami pusing, lemas hingga kehilangan kesadaran.

Namun, bukan berarti setiap pelari yang pingsan setelah maraton mengalami dehidrasi. Ada kondisi lain yang juga harus diperhatikan, termasuk hiponatremia terkait olahraga, yakni kadar natrium darah menjadi terlalu rendah.

Kondisi ini dapat terjadi ketika seseorang minum air dalam jumlah berlebihan selama aktivitas panjang sehingga kadar natrium dalam darah terdilusi. Risiko tersebut dikenal pada peserta maraton, ultramaraton, dan olahraga ketahanan lainnya.

Di sisi lain, kehilangan cairan melalui keringat memang dapat menyebabkan dehidrasi. AHA mencatat gejalanya dapat berupa rasa haus, mulut kering, sakit kepala, kelelahan, pusing, hingga penurunan kesadaran pada kondisi berat.

Cuaca panas menambah beban bagi tubuh. Saat berolahraga, tubuh menghasilkan panas dan berusaha menurunkannya melalui keringat. Dalam kondisi panas dan lembap, proses pelepasan panas menjadi lebih sulit. CDC mengingatkan bahwa orang yang berolahraga dalam cuaca panas memiliki risiko lebih tinggi mengalami dehidrasi dan penyakit akibat panas. Jika mulai merasa lemah atau hendak pingsan, aktivitas harus segera

dihentikan dan tubuh dipindahkan ke tempat yang lebih sejuk.

Bukan Hanya Soal Minum

Cerita Acha juga menyinggung asupan makanan setelah maraton. "Gak langsung makan protein," ujarnya ketika menjelaskan mengapa tubuhnya terasa sangat lemah.

Setelah olahraga ketahanan, tubuh memang membutuhkan pemulihan. Cairan dan elektrolit yang hilang perlu diganti, sementara asupan makanan membantu mengisi kembali energi dan menyediakan bahan untuk proses pemulihan otot. American Heart Association menyebut minuman yang mengandung karbohidrat dan elektrolit dapat membantu rehidrasi setelah dehidrasi akibat aktivitas berat pada kondisi tertentu.

Meski demikian, protein bukan satu-satunya zat gizi yang dibutuhkan setelah maraton. Pelari juga membutuhkan karbohidrat untuk mengembalikan cadangan glikogen yang terkuras selama aktivitas panjang. Kebutuhan setiap orang berbeda berdasarkan durasi lari, intensitas, ukuran tubuh, kondisi cuaca, dan pola latihan.

Yang juga penting

adalah tidak me-maksakan minum sebanyak-banyak-nya. Tujuannya bukan sekadar memasukkan cairan sebanyak mungkin, melainkan menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Minum berlebihan dalam olahraga jarak jauh justru dapat meningkatkan risiko hiponatremia.

Recovery Tidak Bisa Instan

Acha menyadari tubuhnya membutuhkan waktu untuk kembali pulih.

"Itu pengalaman yang seru banget, lucu, tapi kayak di satu sisi sedih juga karena aduh ini selesai lari panjang dapat prestasi, tapi sudahannya blackout," katanya.

Ia kemudian memberikan jeda sebelum kembali berlari.

"Karena lari 42 kilo pasti recovery-nya tuh agak lama. Jadi untuk bisa lari lagi tuh aku ada jadinya dulu gitu," jelasnya.

Keputusan memberikan waktu pemulihan merupakan bagian penting setelah aktivitas endurance. Rasa lelah setelah maraton dapat berlangsung lebih dari sekadar beberapa jam setelah mencapai garis finis. Pelari perlu memperhatikan kondisi tubuh sebelum kembali menjalani latihan berat.

Jika muncul pusing, lemas berlebihan, mual, kram, atau tanda penyakit akibat panas, latihan harus dihentikan. CDC secara khusus menyarankan orang yang merasa lemah atau hampir pingsan untuk segera menghentikan aktivitas dan mencari tempat yang lebih dingin. (far,ist/dya)



GAJAH AFRIKA DIDUGA MERACIK OBAT DARI HUTAN

Hutan bagi gajah Afrika di kawasan Gunung Elgon, Kenya, rupanya bukan hanya tempat mencari makan. Penelitian terbaru menunjukkan satwa tersebut kemungkinan memilih tanaman tertentu ketika sakit, bahkan ada laporan induk gajah memberikan bahan tanaman kepada anaknya. Temuan ini membuka kemungkinan bahwa gajah memiliki repertoar pengobatan alami yang lebih kompleks dari yang selama ini diketahui.

Penelitian yang dipublikasikan di *Journal Scientific Reports* mendokumentasikan penggunaan 35 spesies tumbuhan dari 23 famili oleh gajah Afrika di kawasan Gunung Elgon. Peneliti juga mencatat empat jenis tanah, mineral, atau tanah liat yang dimanfaatkan gajah.

Namun, peneliti berhati-hati menggunakan istilah "mengobati diri". Studi tersebut terutama bersumber dari kesaksian delapan orang dari komunitas Sabaot yang memiliki pengalaman langsung mengamati gajah, bukan dari eksperimen yang membuktikan khasiat obat pada gajah.

Delapan informan itu terdiri atas pengawas satwa liar komunitas, mantan penjaga hutan, tetua masyarakat, pemandu, dan pihak lain yang bekerja atau tinggal di sekitar kawasan Gunung Elgon. Wawancara dilakukan pada Oktober 2023 hingga September 2024. Para peneliti kemudian mengidentifikasi tanaman secara taksonomis melalui spesimen herbarium.

Dari 39 sumber daya alam yang disebutkan dalam wawancara, 34 atau 87 persen juga dikenal masyarakat setempat memiliki kegunaan pengobatan tradisional. Sebanyak 25

sumber daya disebut informan sebagai obat bagi gajah. Peneliti menemukan delapan spesies yang memenuhi kategori perilaku paling kuat: tanaman dicari gajah yang terlihat sakit untuk tujuan terapeutik atau diberikan kepada anaknya sebagai bagian dari perawatan kesehatan.

Delapan tanaman tersebut adalah *Aloe arborescens*, *Bersama abyssinica*, *Coleus barbatus*, *Dombeya burgessiae*, *Dombeya rotundifolia*, *Dombeya torrida* subsp. *torrida*, *Ficus natalensis*, dan *Kuloa usambarensis*. Meski demikian, klasifikasi tersebut menggambarkan dugaan perilaku pengobatan, bukan bukti bahwa seluruh tanaman telah terbukti efektif sebagai obat bagi gajah.

Induk Memberi Tanaman ke Anak

Salah satu kesaksian yang menarik berkaitan dengan tanaman yang secara lokal disebut *Angurweet*. Seorang pemantau satwa mengaku pernah melihat induk gajah menggunakan tanaman tersebut sebagai "obat yang diberikan kepada anak-anak gajah".

Menurut kesaksiannya, tanaman itu digunakan untuk sejumlah keluhan, termasuk sakit perut. Induk gajah disebut memetik daun, mengunyahnya hingga halus, lalu mencampurnya dengan akar dari beberapa pohon lain. Ramuan tersebut kemudian dilaporkan dicampurkan dengan susu induk sebelum diberikan kepada anak.

Anak gajah kemudian mengunyah campuran itu dan meludahkan bagian yang padat.

Perilaku semacam ini oleh peneliti disebut *allo-medication*, yakni penggunaan bahan yang dianggap

memiliki fungsi pengobatan untuk individu lain, bukan untuk diri sendiri. Studi terbaru tersebut menyebut temuan mengenai kemungkinan *allo-medication* pada gajah Afrika sebagai salah satu aspek yang masih membutuhkan pengamatan lebih lanjut.

Profesor Michael Huffman, ahli perilaku pengobatan satwa yang tidak terlibat dalam penelitian, menilai temuan mengenai induk gajah tersebut menarik. Namun, ia menekankan perlunya bukti lebih banyak untuk memastikan bahwa induk memang sengaja memberikan pengobatan khusus kepada anak.

Karena itu, peneliti kini memasang kamera bersama petugas satwa liar setempat untuk merekam perilaku gajah secara langsung. Mereka ingin mengetahui apakah gajah memang memilih tanaman

tertentu ketika mengalami kondisi kesehatan tertentu.

Dr Fabien Schultz dari Bernhard Nocht Institute for Tropical Medicine mengatakan pengetahuan masyarakat setempat telah memberikan semacam "peta" bagi penelitian tersebut.

"Sekarang kami ingin mengikuti gajah-gajah tersebut dan menyelidiki apakah mereka memilih tumbuhan tertentu ketika mengalami kondisi kesehatan tertentu, serta apakah tumbuhan itu memiliki aktivitas biologis yang relevan," kata Schultz.

Fenomena tersebut masuk dalam bidang yang dikenal sebagai *zoopharmacognosy*, yakni kajian mengenai bagaimana hewan menggunakan bahan-bahan alami untuk menghadapi gangguan kesehatan atau kondisi biologis tertentu. (far/ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **SIDOARJO:** TEGUH A | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** AIS | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **TRENGGALEK:** HERLAMBAANG | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

RITUAL RAMBUT PEREMPUAN JEPANG: HAIR OILING HINGGA PENGERINGAN LEMBUT

Rambut lembut, berkilau, dan tampak sehat kerap diasosiasikan dengan rutinitas perawatan rambut perempuan Jepang. Namun, kuncinya bukan semata-mata pada produk tertentu. Perawatan tersebut lebih banyak bertumpu pada kebiasaan yang konsisten, mulai dari memperhatikan kesehatan kulit kepala, membersihkan rambut secara lembut, hingga mengurangi gesekan dan panas saat rambut dikeringkan.



JENIS-JENIS CONDITIONER JEPANG

- Protein Sutra**
 Membantu rambut lebih halus, lembut, dan mudah diatur
- Keratin**
 Membantu memperkuat dan merawat rambut rapuh/rusak.
- Minyak Nabati**
 Camellia/tsubaki membantu melembapkan dan memberi kilau.
- Moisturizing**
 Fokus menjaga kelembapan rambut kering dan kasar.
- Scalp Conditioner**
 Ditujukan untuk perawatan kulit kepala; pilih sesuai kondisi kulit kepala.
- Repair conditioner**
 Untuk rambut rusak akibat pewarnaan, styling, atau panas

membawa busa dan kotoran melewatinya.

Frekuensi keramas pun tidak harus sama untuk semua orang. AAD menyarankan menyesuakannya dengan seberapa cepat rambut dan kulit kepala menjadi kotor atau berminyak. Rambut lurus dengan kulit kepala berminyak, misalnya, dapat membutuhkan keramas lebih sering dibandingkan rambut yang kering, tebal, atau bertekstur.

Artinya, label "cara perempuan Jepang" tidak semestinya diterjemahkan sebagai aturan yang harus ditiru persis. Kondisi rambut dan kulit kepala tetap menjadi pertimbangan utama.

Conditioner Kunci Kelembapan

Tahap berikutnya adalah conditioner. Dalam bahan Beautynesia, conditioner disebut sebagai bagian penting karena membantu mengembalikan kelembapan, menghaluskan kutikula, serta memberikan perlindungan terhadap tekanan dari lingkungan.

Sejumlah produk conditioner Jepang menggunakan bahan seperti hydrolyzed silk protein atau protein sutra, keratin, serta minyak nabati. Kandungan tersebut digunakan untuk membantu memperbaiki kondisi

batang rambut dan mempertahankan kelembapannya.

Secara dermatologis, penggunaan conditioner memang memiliki fungsi penting.

AAD menjelaskan conditioner membantu melembapkan dan mengurai rambut sehingga lebih mudah ditata. Untuk rambut halus atau lurus, conditioner dapat lebih difokuskan pada bagian ujung, sedangkan rambut kering atau keriting dapat membutuhkan conditioner pada bagian rambut yang lebih luas.

Untuk rambut yang mudah kusut atau rusak, AAD juga menyarankan penggunaan leave-in conditioner sesuai kebutuhan. Produk tersebut sebaiknya diaplikasikan pada batang hingga ujung rambut, bukan berlebihan pada kulit kepala karena dapat menyebabkan penumpukan produk.

Jangan Menggosok Rambut Saat Meringkan

Ada satu tahap yang sering luput: mengeringkan rambut.

Rambut dalam keadaan basah lebih rentan mengalami kerusakan. Karena itu, setelah keramas, rambut sebaiknya tidak dipelintir atau digosok kuat menggunakan handuk.

Vogue mencatat bahwa dalam praktik perawatan rambut ala Jepang, proses pengeringan dilakukan secara lembut. Air berlebih terlebih dahulu diperas dengan tangan tanpa menarik atau memelintir rambut. Handuk yang memiliki daya serap tinggi, termasuk mikrofiber, dapat digunakan untuk mengurangi kadar air sebelum rambut terkena udara panas dari pengering.

AAD memberikan saran serupa. Rambut dapat dibungkus dengan handuk atau kaus berbahan lembut untuk menyerap air. Menggosok rambut dengan kasar ketika masih basah justru dapat menyebabkan kerusakan. Penggunaan alat pemanas juga sebaiknya dibatasi dan, bila diperlukan, menggunakan suhu rendah atau sedang serta produk pelindung panas.

Dalam praktik perawatan rambut di Jepang yang ditulis Vogue Arabia, pengeringan bahkan diperlakukan sebagai bagian dari rutinitas perawatan. Penata rambut Maria Roberts, yang pernah menjalani pelatihan di Jepang, menjelaskan bahwa perhatian besar diberikan pada kulit kepala. Ia juga menyebut penggunaan sikat silikon untuk membantu proses pemijatan ketika keramas. (far,ist/dya)

Tak Mengikis Minyak Alami

Setelah menggunakan minyak, tahap berikutnya adalah keramas. Prinsip yang ditekankan bukan mencuci rambut sekeras mungkin, melainkan membersihkan kulit kepala secara efektif tanpa membuat rambut kehilangan kelembapan secara berlebihan.

Beautynesia menyarankan penggunaan sampo yang lembut. Rambut dan kulit kepala terlebih dahulu dibilas menggunakan air hangat. Sampo kemudian dituangkan secukupnya dan dibuat berbusa dengan sedikit air sebelum diaplikasikan ke kulit kepala.

Pemijatan dilakukan menggunakan ujung jari, bukan kuku. Cara ini membantu membersihkan kulit kepala sekaligus mengurangi risiko iritasi akibat garukan.

Pendekatan tersebut sejalan dengan panduan American Academy of Dermatology (AAD). Para dermatolog menyarankan sampo terutama diaplikasikan pada kulit kepala, tempat minyak berlebih, sel kulit mati, dan penumpukan produk berada. Rambut sepanjang batang tidak perlu digosok secara agresif karena proses pembilasan sudah membantu

Nusron Disebut di Jejakdari Hal 1

Mantan Staf Khusus Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, mengklaim uang USD1 juta yang disebut berkaitan dengan Panitia Khusus Haji DPR 2024 telah sampai kepada Nusron.

Menurut Gus Alex, uang tersebut disalurkan melalui Zainal Abidin, sosok yang disebut memiliki hubungan dengan Nusron. Klaim itu disampaikan Gus Alex ketika jeda persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Keterangan tersebut belum diuji sebagai fakta hukum dan belum disertai tanggapan Nusron. Namun, kemunculan nama seorang menteri di persidangan membuka pertanyaan baru, apakah Nusron akan dihadirkan untuk menjelaskan klaim aliran uang tersebut?

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan peluang menghadirkan pihak lain sebagai saksi tetap terbuka. Kebutuhannya akan ditentukan berdasarkan fakta yang berkembang di persidangan dan penilaian majelis hakim.

"Ya, nanti kita lihat perkembangannya. Ini kan perkara sudah masuk ya di persidangan. Nanti Majelis Hakim akan menilai juga apakah kemudian dibutuhkan untuk menghadirkan yang bersangkutan memberikan keterangan sebagai saksi dalam rangkaian proses sidang," kata Budi Senin (28/9/2026).

KPK menyerahkan keputusan pemanggilan kepada majelis hakim sesuai kebutuhan pembuktian perkara.

"Ya nanti kita tunggu independensi dari Majelis Hakim dalam melihat fakta-fakta yang muncul dalam persidangan tersebut," ujarnya.

Menurut Budi, keterangan saksi yang memunculkan nama pihak lain akan dianalisis oleh jaksa penuntut umum KPK. Saksi tambahan dapat dihadirkan apabila keterangannya diperlukan untuk membuat perkara semakin terang.

"Bagaimana kebutuhan untuk mendapatkan keterangan-keterangan saksi lain yang kemudian tentunya juga terbuka peluang, misalnya dihadirkan dalam proses persidangan," ujarnya.

Keterangan Gus Alex mengenai aliran USD1 juta belum otomatis membuktikan uang tersebut diterima Nusron. Jaksa masih harus menghubungkan klaim itu dengan alat bukti, keterangan saksi lain, dan konstruksi perkara yang didakwakan.

"Dari keterangan para saksi yang kemudian menjadi fakta di persidangan, tentu semuanya akan dilakukan analisis secara

komprehensif oleh jaksa penuntut umum KPK," kata Budi.

Analisis tersebut diperlukan agar majelis hakim memperoleh gambaran utuh mengenai pembagian kuota tambahan dan dugaan aliran uang yang mengikutinya.

"Secara khusus, keterangan-keterangan tersebut tentunya membantu untuk menjelaskan secara objektif bagaimana konstruksi perkara ini, sehingga nanti Majelis Hakim dapat menilai dan kemudian memutuskan atas apa yang sudah didakwakan oleh jaksa penuntut umum KPK," ujarnya.

Persidangan perkara kuota haji masih akan menghadirkan banyak saksi. Selain pejabat Kementerian Agama, jaksa KPK berencana memanggil pihak asosiasi dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

"Masih akan banyak saksi yang nanti akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum KPK. Tidak hanya dari pihak-pihak Kementerian Agama, tapi juga dari pihak asosiasi ataupun PIHK," kata Budi.

Salah satu titik yang akan dibongkar adalah perubahan pembagian kuota haji tambahan. Berdasarkan ketentuan yang menjadi rujukan, sebanyak 92 persen kuota dialokasikan untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

Dalam pelaksanaannya, pembagian tersebut berubah menjadi masing-masing 50 persen untuk haji reguler dan haji khusus.

"Dalam konteks bagaimana proses inisiasi yang dilakukan oleh para asosiasi itu agar di Kementerian Agama melakukan perubahan pembagian kuota haji tambahan itu yang kalau menurut undang-undang itu 92 persen-8 persen. Tapi kemudian dibagi menjadi 50 persen-50 persen untuk kuota haji reguler dan kuota haji khusus," ungkap Budi.

KPK akan mendalami siapa yang menginisiasi perubahan tersebut, bagaimana kuota khusus dibagikan, dan ke mana uang dari sejumlah PIHK diduga mengalir.

"Untuk yang lajur non-reguler atau lajur khusus tersebut, bagaimana proses pengisiannya, sampai dengan bagaimana aliran uang itu," tutur Budi. "Bahwa dalam konstruksi perkara ini ada dugaan aliran uang dari para PIHK kepada oknum-oknum di Kementerian Agama," sambungnya.

BAP Zainal: Nusron Menolak

Versi berbeda muncul dalam BAP Zainal Abidin yang diberitakan pada Senin (28/9/2026). Menurut keterangan Zainal dalam BAP, Nusron menolak menerima uang itu. Dengan demikian, keterangan Zainal tidak mendukung kesimpulan bahwa Nusron menerima uang tersebut

secara langsung.

Dalam BAP yang sama, Zainal mengungkapkan bahwa dirinya mengenal Nusron dan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sejak keduanya masih berkuliah di Universitas Indonesia.

Ketika Pansus Haji terbentuk pada 2024, Zainal mengaku pernah diminta Yaqut membantu berkomunikasi dengan Nusron. Menurut Zainal, komunikasi tersebut berkaitan dengan upaya agar Pansus Haji tidak mengeluarkan rekomendasi yang memberatkan Kementerian Agama maupun Yaqut.

BAP Zainal juga memuat keterangan mengenai pertemuannya dengan Gus Alex di sebuah kedai kopi di Cibubur sekitar Agustus 2024.

Dalam pertemuan tersebut, menurut Zainal, Gus Alex menyampaikan adanya uang untuk Pansus DPR dan meminta bantuannya menyampaikan uang itu kepada Nusron.

Zainal mengaku tidak bersedia menjadi perantara langsung. Ia kemudian menyarankan agar Gus Alex berkomunikasi dengan Ace Hasan Syadzily, yang saat itu menjabat Ketua Komisi VIII DPR.

Beberapa hari kemudian, menurut Zainal, Ace menghubunginya dalam keadaan marah dan menyatakan tidak bersedia menerima uang dari Gus Alex.

Setelah itu, Gus Alex kembali meminta Zainal menyampaikan uang kepada Nusron. Zainal kembali menyatakan tidak bisa menjadi perantara langsung dan kemudian menyebut nama Khomsin sebagai orang yang dapat dititipi uang tersebut.

Sementara, dalam BAP Gus Alex yang diberitakan sebelumnya, sumber US\$1 juta juga diuraikan secara lebih rinci.

Gus Alex menyebut sekitar US\$300 ribu berasal dari PIHK yang berkaitan dengan kuota haji. Sebanyak US\$100 ribu disebut merupakan uang pinjaman Agus Syafi kepada Budi Darmawan, mantan Ketua Umum HIMPUH.

Sementara US\$600 ribu lainnya, menurut keterangan Gus Alex, tidak diketahuinya sumbernya. Uang tersebut disebut disiapkan Muhammad Nuruzzaman.

Gus Alex kemudian menyebut uang US\$1 juta dikumpulkan oleh seseorang bernama Erik, yang dalam keterangannya disebut sebagai anggota Densus sekaligus ajudan menteri. Dari Erik, uang tersebut disebut diserahkan kepada Khomsin atau Khomsun.

Dalam keterangannya, Gus Alex mengaitkan Khomsin/Khomsun dan Acong dengan lingkungan Nusron. Namun, Gus Alex tidak mengatakan melihat langsung Nusron menerima

uang tersebut. Keyakinannya mengenai penerimaan uang oleh Nusron didasarkan pada rantai perantara yang ia sebut dalam keterangannya.

Persoalan US\$1 juta tersebut sebenarnya sudah muncul jauh sebelum nama Nusron kembali disebut dalam persidangan September.

Pada Senin, 13 April 2026, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan KPK telah menyita US\$1 juta yang disebut semula disiapkan pihak Yaqut Cholil Qoumas untuk Pansus Hak Angket Haji DPR RI 2024.

Keterangan tersebut diberitakan ANTARA pada Selasa, 14 April 2026. Menurut Achmad, uang itu disita dari seorang perantara berinisial ZA dan belum sampai kepada pihak-pihak yang dituju di Pansus.

"Kami bisa pastikan bahwa itu belum sampai ke pihak-pihak yang tertuju di pansus sehingga kemudian masih ada di perantara ZA, dan di situlah kami amankan," kata Achmad pada 13 April 2026.

Perkembangan berikutnya muncul pada Rabu, 12 Agustus 2026. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mendalami status penyerahan US\$1 juta yang disebut disiapkan untuk memengaruhi hasil Pansus Haji DPR RI.

"Tentu ini juga menjadi informasi yang nanti akan didalami, ditelusuri seperti apa kedudukan kaitannya dengan perkara ini. Apakah kemudian ini firm sudah delivered atau seperti apa. Nanti, kami akan update terus perkembangannya," kata Budi di Gedung KPK.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pada Agustus, KPK masih menyatakan perlu memastikan apakah uang itu benar-benar telah delivered atau diterima pihak yang dituju. Artinya, pernyataan KPK pada April mengenai uang yang belum sampai Pansus tidak boleh dicampur dengan keterangan-keterangan baru yang muncul dalam persidangan September.

Selain US\$1 juta, persidangan juga mengungkap aliran uang US\$400 ribu yang dikaitkan dengan rangkaian Pansus Haji.

Dalam persidangan pada 18 Agustus 2026, Gus Alex disebut meminta Syaiful Bahri menyerahkan US\$400 ribu kepada Erik untuk memenuhi permintaan Zainal Abidin.

KPK kemudian menyatakan pada 2 September 2026 bahwa jaksa penuntut umum akan menelaah keterangan yang muncul dalam persidangan. "Jaksa Penuntut Umum KPK tentu akan telaah dan analisis setiap keterangan yang muncul dalam persidangan," kata Budi Prasetyo pada 2 September 2026. (wid,ini,kcm,ist/dya)

Di Balik Fasilitas Mewah Lapas Cibinong

55 WARGA BINAAN DIPERIKSA, TERMASUK SAMBO

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) memeriksa 90 orang terkait temuan Ombudsman RI mengenai dugaan fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari jumlah tersebut, 55 merupakan warga binaan, termasuk mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, sedangkan 35 lainnya merupakan pegawai lapas.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi mengatakan pemeriksaan dilakukan Direktorat Pengamanan dan Intelijen (Ditpamtel) serta Direktorat Kepatuhan Internal dan Etika Profesi (Ditpatnal) Ditjenpas. Pemeriksaan terhadap warga binaan mencakup 21 orang yang menjalani asimilasi di Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE), 33 warga binaan perkara tindak pidana korupsi, serta satu warga binaan perkara pidana umum, yakni Ferdy Sambo.

"Ditpamtel dan Ditpatnal melakukan pemeriksaan terhadap 21 warga binaan asimilasi di SAE (Sarana Asimilasi dan Edukasi), 33 warga binaan perkara tipikor, dan satu binaan atas nama Ferdy Sambo perkara pidana umum," kata Mashudi dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Senin (28/9/2026), seperti dipantau dari tayangan TV Parlemen.

Pemeriksaan itu juga diikuti penonaktifan lima pejabat Lapas Cibinong. Kelimanya yakni Kepala Lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik (Kasi Binadik), Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Kamtib), serta Kepala Urusan Umum. Ditjenpas juga memeriksa secara fisik bangunan dan sejumlah area yang menjadi bagian dari temuan Ombudsman.

Temuan Ombudsman bermula dari inspeksi mendadak pada Rabu (23/9). Tim menemukan lebih dari 10 bangunan di bagian belakang lapas yang tampak seperti hunian privat. Salah satu bangunan dilengkapi ruang tamu, kamar tidur, ruang makan, dapur, televisi, kulkas, dan perlengkapan rumah tangga lainnya.

Dalam perkembangan terbaru yang disampaikan Mashudi kepada Komisi XIII, bangunan yang menjadi sorotan itu disebut sebagai rumah dinas pegawai. Total terdapat 16 unit rumah dinas, tetapi hanya tiga yang tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Sebanyak 13 bangunan lainnya berada di bantaran Sungai Ciliwung dan belum tercatat dalam sistem aset negara. Status administrasi, aset, dan pemanfaatan 13 bangunan tersebut masih didalami.

Menurut keterangan pejabat Lapas Cibinong dalam rapat DPR, 13 rumah tersebut dibangun pada Januari hingga April 2023 dan kemudian ditempati



Petugas berjaga di depan rumah yang sebelumnya diperiksa secara mendadak oleh Ombudsman RI di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.(ant)

pegawai berdasarkan surat keputusan yang ditandatangani kepala lapas saat itu. Namun, proses administrasi terkait status aset dan izin pemanfaatannya belum tuntas ketika pembangunan dilakukan.

Selain rumah dinas, tim investigasi juga mengklarifikasi sejumlah temuan lain. Area yang sebelumnya diduga sebagai simulator golf disebut merupakan fasilitas yang sedang disiapkan menjadi loker. Sementara lahan SAE yang diduga digunakan sebagai tempat parkir disebut menjadi alternatif ketika area parkir utama penuh. Tim juga menyatakan belum menemukan jalur tikus seperti yang diduga sebelumnya.

Kuasa Hukum Membantah

Di tengah pemeriksaan tersebut, nama Ferdy Sambo menjadi sorotan setelah masuk dalam daftar warga binaan yang diperiksa. Namun, Sambo melalui kuasa hukumnya, Arman Hanis, membantah pernah menempati atau menikmati fasilitas mewah yang ditemukan Ombudsman.

Arman menyebut Sambo menjalani pidana di Blok A 2.5 bersama warga binaan lain.

"Klien kami pada saat ini menjalani pidana di dalam lapas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menempati sel Blok A 2.5 bersama dengan warga binaan lainnya," ujar Arman dalam keterangan tertulis, Senin (28/9).

Arman juga membantah Sambo pernah menempati bangunan yang disebut dalam temuan Ombudsman. Menurut dia, selama kunjungan

keluarga maupun kuasa hukum, pertemuan dengan Sambo berlangsung di area kunjungan umum.

"Tidak pernah di rumah hunian sebagaimana dipublikasikan dalam temuan Ombudsman," katanya.

Arman menyatakan pihaknya mendukung pemeriksaan Ditjenpas untuk mengungkap fakta secara utuh. Ia juga meminta pemberitaan mengenai Sambo mengedepankan akurasi dan keberimbangan.

"Kami juga mengimbau rekan-rekan media untuk berpegang pada prinsip akurasi dan keberimbangan serta tidak menyampaikan tuduhan yang mencemarkan tanpa bukti faktual, sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers," ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka mempertanyakan keputusan Ditjenpas yang hanya menyebut nama Ferdy Sambo secara terbuka. Rieke meminta Ditjenpas menjelaskan identitas warga binaan lain yang diperiksa untuk memastikan proses investigasi berjalan transparan.

"Pertanyaannya adalah kenapa hanya Ferdy Sambo yang disebutkan? Kenapa 21 warga binaan yang asimilasi dan 33 warga binaan kasus tipikor tidak? Tulis, Pak, semuanya," kata Rieke.

Dalam
rapat

tersebut, Rieke juga menyebut nama Harvey Moeis dan Indra Kenz ketika mempertanyakan daftar warga binaan yang diperiksa. Namun, Ditjenpas belum mengumumkan seluruh identitas 55 warga binaan tersebut. Yang disampaikan secara resmi baru pembagian berdasarkan kelompok perkara, serta nama Ferdy Sambo sebagai satu-satunya warga binaan perkara pidana umum yang disebutkan.

Sebanyak 13 dari 16 rumah dinas yang berada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, belum tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) masih mendalami status administrasi, aset, dan pemanfaatan bangunan tersebut.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi mengungkapkan persoalan tersebut dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (28/9/2026). Menurut dia, dari 16 unit rumah dinas yang ada, baru tiga unit yang tercatat dalam SIMAK BMN.

"Terhadap 13 bangunan rumah dinas yang berada di bantaran Sungai Ciliwung dan belum tercatat dalam SIMAK BMN saat ini masih dilakukan pendalaman terhadap aspek administrasi, status aset, dan pemanfaatan," kata Mashudi dalam rapat tersebut.

Bangunan-bangunan itu sebelumnya menjadi sorotan setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak ke Lapas Cibinong pada Rabu (23/9). Tim Ombudsman menemukan sejumlah bangunan di bagian belakang lapas yang tampak seperti hunian privat, lengkap dengan sejumlah fasilitas rumah tangga. Ombudsman kemudian meminta penjelasan mengenai keberadaan dan pemanfaatan bangunan tersebut. (gus,ist, ant,kum/dya)



Wisnu Hani Putanto

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong nonaktif